

Bali, Benteng Terbuka

Yudistira Adnyana*



Judul : Bali Benteng Terbuka 1995 -2005
Penulis : Henk Schulte Nordholt
Penerbit : Pustaka Larasan dan KITLV jakarta
Tahun : 2010
Tebal : xxx + 120 hlm

Buku ini mengisahkan dinamika sosial di Bali dalam satu dasawarsa (1995–2005). Pesan utamanya, Bali sedang menghadapi dilema. Di satu sisi, bagaimana meraih otonomi daerah yang lebih besar *vis-a-vis* Jakarta, mengingat desentralisasi telah menimbulkan perpecahan administratif yang membuat tindakan koordinasi di tingkat provinsi menjadi ilusi belaka. Pada sisi lain, bagaimana menangkal pengaruh luar yang berbahaya dan pendatang yang tidak diinginkan, tanpa mencederai perekonomian Bali yang membutuhkan pengunjung asing, investor dan tenaga kerja murah agar dapat bertahan. Ringkasnya, bagaimana menjadikan Bali sebagai benteng terbuka (hal. 4). Karya ini menyadarkan pembaca bahwa Bali telah menjadi medan terbuka bagi pertarungan relasi kekuasaan ekonomi-politik nasional maupun global.

Dimana posisi buku ini? Pada bagian kata pengantar, Dwipayana mengungkap terdapat dua cara pandang berbeda terkait isu demokratisasi dan desentralisasi.

* Yudistira Adnyana adalah alumni S2 Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta. Kini mengajar di FISIP Universitas Ngurah Rai Denpasar.

Pertama, kubu optimisme-profesional, yang meyakini bahwa pelaksanaan desentralisasi akan berjalan secara normal, *linear* serta membawa dampak positif bagi daerah. Kedua, kubu pesimisme-realistis yang berpendapat bahwa desentralisasi bukanlah proses yang bersifat bebas nilai sehingga apa itu “yang baik” merupakan hasil pergumulan relasi kuasa antar kekuatan politik yang bermain dalam desentralisasi (xiii-xiv).

Cara pandang buku ini termasuk kubu kedua. Politik di Bali dilukiskan secara “muram” seperti kata-katanya, “Di Bali, otonomi daerah dan demokrasi elektoral tidak otomatis membuahkan pemerintahan yang lebih baik. Sebagai gantinya, kedua proses itu memperkuat pembentengan politik identitas Bali. Ajeg Bali menghapus wacana tentang kewarganegaraan (inklusif) yang menjadi landasan utama demokrasi. Ironisnya, diluar segala upaya meraih penyucian dan pembaruan moral, korupsi merajalela di lingkaran-lingkaran administratif”.

Dalam memahami realitas sosial Bali, buku ini condong dengan pendekatan konflik dibanding pendekatan harmoni. Pendekatan harmoni, memandang realitas sosial di Bali sebagai citra yang harmonis, eksotis dan apolitis. Margaret Mead, Gregory Bateson, Jane Belo (antropolog), Walter Spies, Colin McPhee, Katherine Mershon (seniman) dan ilustrator Miguel Covarrubias adalah sederet nama yang termasuk dalam kelompok ini. Sebaliknya pendekatan konflik, memandang realitas sosial di Bali cenderung penuh konflik dan kekerasan. Geoffrey Robinson (1995) jadi salah satu wakil kelompok ini.

Pelaksanaan otonomi daerah ditengarai memicu kekerasan karena lemahnya koordinasi otoritas pemerintah pusat dan provinsi. Akibatnya, lembaga-lembaga administratif tidak mampu lagi mengelola banyak konflik. Dibawah tajuk “kasus adat” sengketa tanah dan perbatasan

serta konflik mengenai kasta dan klaim-klaim status di dalam desa mudah meledak jadi tindak kekerasan. Mengutip Majalah *Sarad*, antara 1997 dan 2003 nyaris setiap bulan terjadi “kasus adat” yang berujung pada kekerasan massal.

Selain itu, gejala premanisme politik turut menambah panjang daftar kekerasan di Bali (hal. 54-57). Dalam konteks ini, perbandingan antara dua rezim politik amat bermanfaat. Ternyata gejala premanisme politik di tingkat lokal “kenyal” dalam rezim otoriter (Orde Baru) maupun rezim demokratis (Orde Reformasi). Dari sisi terlihat masih terjadi kesenjangan antara sistem demokrasi dengan budaya demokrasi. Tepatnya, budaya demokrasi tercecer di tengah pembaharuan sistem demokrasi.

Buku ini mengkritisi wacana Ajeg Bali yang digagas cendekiawan kelas menengah urban. Di mata para pengagasnya, Ajeg Bali menjadi semboyan yang mengisyaratkan kebutuhan akan suatu pertahanan-diri sosial-budaya. Tujuannya, membentengi Bali dari ancaman luar. Bentuk-bentuk kekerasan baru yang menghasilkan lonjakan rasa tidak aman menyediakan landasan bagi gerakan Ajeg Bali.

Wacana Ajeg Bali dinilai kurang kuat rujukan historisnya. Argumen diperkokoh dengan membeberkan bukti-bukti sejarah Bali yang penuh konflik dan kekerasan serta krisis yang hebat. Misalnya: 1880-an – 1890-an terjadi peperangan internal; 1906-1917 terjadi penaklukan kolonial dan bencana alam; 1930-an terjadi depresi ekonomi; 1940-an pendudukan Jepang dan revolusi; 1950 dan awal 1960-an terjadi ketegangan politik, gunung meletus dan gagal panen; 1965-1966 terjadi pembantaian massal; akhir 1980-an keprihatinan mengenai efek globalisasi, kerusakan lingkungan dan investasi tak terkontrol; 1990-an krisis politik dan ekonomi, teroris, epidemi SARS dan perang

Irak. Dalam rentang 120 tahun, hanya ada tiga dekade kemakmuran yang relatif mulus, periode antara 1919 dan 1929, serta 1970 sampai akhir 1980-an (hal. 15).

Bagi Schulte Nordholt, adalah paradoks cendekiawan kelas-menengah Bali cenderung menekankan keotentikan regional mereka (dan mengingkari identitas Indonesia mereka). Menurutnya, konsep Ajeg Bali didasarkan pada model pascakolonial yang mengacu pada masyarakat tertutup dan homogen. Cendekiawan Bali sesungguhnya menghadapi tantangan luar-biasa besar, yakni bagaimana Bali dapat bertahan dalam konteks global yang lebih luas?

Sampai di sini dilema Bali sebagai benteng terbuka tidak dapat dipecahkan. Pasalnya, perekonomian terbuka dan identitas kultural tertutup tidak cocok satu sama lain. Salah satu tantangan terbesar dihadapi para administrator dan cendekiawan Bali adalah mengembangkan suatu gagasan yang lebih dinamis tentang kebudayaan mereka, yang menawarkan ruang bagi hibriditas dan dimensi-dimensi transnasional.

Penulisnya membayangkan sebuah Bali yang berfikir terbuka, percaya diri, teratur dan berwawasan ke luar, sebuah Bali sebagai rekanan metropolis bisnis seperti Singapura akan muncul di masa depan.